

JPPI Kecam Sekolah Negeri Surabaya yang Tolak Calon Murid Disabilitas

Padahal, dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) sudah ada jalur afirmasi yang disediakan khusus untuk calon murid disabilitas.



Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji di Jakarta, 30 Januari 2025. Antara/Sean Filo Muhamad

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam sekolah negeri di Surabaya, Jawa Timur, yang menolak calon murid dengan kondisi **disabilitas**. Padahal, dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) sudah ada jalur afirmasi yang disediakan khusus untuk calon murid disabilitas.

Koordinator Nasional **JPPI** Ubaid Matraji mengatakan sekolah negeri tidak boleh menolak anak dengan disabilitas. "Mereka harus diberikan karpet merah untuk bisa diterima di sekolah," kata dia saat dihubungi, Jumat, 24 Juni 2025.

Sekolah yang menolak calon murid disabilitas, kata dia, berarti melanggar prinsip dan visi pendidikan inklusif. "Harusnya enggak boleh menolak," ujarnya.

Ubaid turut mengkritisi syarat masuk sekolah negeri untuk calon murid disabilitas. Dia menilai syarat itu memberatkan anak dengan disabilitas. Misalnya wajib memiliki kartu penyandang disabilitas serta melampirkan keterangan dari dokter.

Kurangnya guru pendamping khusus di sekolah negeri, kata Ubaid, tak boleh dijadikan alasan untuk menolak anak disabilitas. "Menghadirkan guru pendamping itu kewajiban pemerintah. Bukan malah siswanya yang ditolak," kata Ubaid.

Sebelumnya, Ombudsman wilayah Jawa Timur menerima laporan perihal pelaksanaan SPMB di Surabaya, Jawa Timur. Laporan tersebut datang dari Komisi Nasional Disabilitas RI (KND-RI) yang menyampaikan ada 26 calon murid difabel lulusan berbagai SMP negeri di Surabaya dan Sidoarjo yang ditolak pada jalur afirmasi SMA negeri dan SMK negeri.

“Mereka terindikasi korban diskriminasi pada jalur afirmasi SPMB,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, dikuti dari situs resmi Ombudsman.

Saat diminta tanggapan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebut penolakan calon murid disabilitas yang mendaftar lewat jalur afirmasi sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah daerah. “Itu kebijakan masing-masing pemerintah daerah,” kata Mu'ti.

Pintu Sekolah Terbuka Lebar: JPPI dan YDAI Kawal Hak Pendidikan Anak Disabilitas di Bogor



Admin

Juni 21, 2025 22 Dilihat



Bogor, VibeIndonesia.id – Anak-anak disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan layak, aman, dan setara. Untuk itu, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyatakan komitmennya membuka pintu seluas-luasnya bagi anak-anak difabel agar bisa mengakses sekolah formal, baik negeri maupun swasta.

Saat ini, momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berlangsung. Para orang tua bersama anak-anaknya, termasuk anak-anak difabel, berjibaku mengupayakan agar mereka dapat masuk ke sekolah terbaik. Namun, akses pendidikan bagi anak disabilitas masih menjadi tantangan besar, terutama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama Yayasan Diffable Action Indonesia (YDAI) menggelar kegiatan Global Action Week for Education (GAWE) 2025, Sabtu (21/6) lalu di Panggung Gate 4 Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Mengusung tema “Pendidikan Inklusif untuk Semua”, kegiatan ini menjadi yang kedua kalinya

dilaksanakan di Kabupaten Bogor, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2018 di lokasi yang sama.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 200 anak disabilitas yang datang bersama orang tua, saudara, dan guru pendamping khusus. Meski malam sebelumnya hujan deras mengguyur kawasan Bogor dan pagi itu cuaca masih mendung serta udara dingin menusuk tulang, semangat anak-anak dan keluarga tidak surut untuk hadir memeriahkan GAWA 2025.

Suasana semakin akrab dengan berbagai rangkaian kegiatan, seperti senam inklusi bersama, dongeng inspiratif yang dibawakan oleh Kak Anshori dan Kak Leni, serta permainan interaktif yang dirancang khusus agar anak-anak merasa nyaman dan terlibat aktif.

Ketua Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Bapak Dudi, dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ibu Susi. Ubaid menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pihak mutlak dibutuhkan agar layanan pendidikan inklusif, terutama untuk anak-anak disabilitas di Kabupaten Bogor, dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan.

“Kita harus membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak difabel agar dapat bersekolah di sekolah formal, termasuk sekolah inklusi,” ujar Ubaid. Ia juga mengungkapkan fakta miris bahwa berdasarkan data Komisi Nasional Disabilitas (KND), secara nasional hanya sekitar 4 persen anak disabilitas yang bisa mengakses pendidikan formal.

“Momen GAWA ini harus jadi dorongan kuat agar Kabupaten Bogor bisa jadi contoh dalam menyediakan pendidikan setara untuk semua, khususnya anak-anak disabilitas,” tegasnya.

Senada dengan itu, Teguh, Ketua Umum Yayasan Diffable Action Indonesia (YDAI), mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pendidikan inklusif. “Pendidikan adalah hak semua anak, termasuk mereka yang difabel dan masyarakat rentan lainnya. Terlebih kini pemerintah telah menggulirkan kebijakan Pendidikan Dasar 12 Tahun Gratis. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk semua,” seru Teguh.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta yang hadir termasuk jajaran JPPI, perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pengurus YDAI, para guru sekolah inklusi, guru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga para orang tua anak disabilitas membubuhkan tanda tangan dukungan pada tiga poster besar yang disediakan panitia. Poster ini menjadi simbol perjuangan dan pengawalan terhadap implementasi pendidikan inklusif di Bogor.

Tak lupa, apresiasi diberikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, termasuk KADIN Kabupaten Bogor dan Forum UMKM Kabupaten Bogor yang telah memfasilitasi tempat acara.

Semangat inklusi dan keadilan bagi semua anak, tanpa terkecuali, terus digelorakan. Kabupaten Bogor diharapkan menjadi pelopor dalam mewujudkan pendidikan yang setara, aman, dan berkeadilan untuk seluruh anak bangsa. (***)



JPPI Minta Kabupaten Bogor Jadi Percontohan Pendidikan Inklusif, Kecam Praktek Diskriminasi Anak Disabilitas



Muhamad Rifki Fauzan - Sabtu, 21 Juni 2025 | 11:33 WIB



RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor diminta segera menerapkan skema [pendidikan inklusif](#). Harapan ini tertuang dalam kegiatan [Global Action Week Gawe](#), di Stadion Pakansari Cibinong, Sabtu 21 Juni 2025.

Global Action Week Gawe sendiri diinisiasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang berkolaborasi dengan Yayasan Difable Action Indonesia. Ada 200 anak disabilitas yang ikut terlibat.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menjelaskan Global Action Week Gawe merupakan kampanye pendidikan inklusif. Ini dipandang penting untuk keberlangsungan hidup anak-anak penyandang disabilitas. Ubaid menyebut, jika mengacu pada data Disabilitas Komite Nasional hanya ada 4 persen anak-anak penyandang disabilitas yang sekolah di tempat formal. Baginya angka tersebut sangat kecil sekali.

“Maka kami ingin suarakan pendidikan inklusif lewat Bogor. Kami berharap Kabupaten Bogor bisa menjadi percontohan bagaimana pemerintah bisa memberikan layanan yang baik terhadap anak-anak disabilitas,” jelas Ubaid.

Momentum Hari Jadi Bogor (HJB) diharap bisa menjadi kado istimewa terhadap layanan pendidikan anak-anak disabilitas. Apalagi ini bertepatan dengan berlangsungnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ubaid menginginkan tidak ada diskriminatif pendidikan terhadap anak-anak disabilitas. Sebab menurut laporan yang diterimanya, di wilayah lain praktek tercela itu masih saja terjadi. “Kami mendapat banyak pengaduan bahwa sekolah menolak anak disabilitas mendaftar. Kami tidak setuju dan mengcam adanya pihak pihak sekolah yang menolak anak-anak disabilitas yang mendaftar,” tegasnya.

Bagi Ubaid ketika anak-anak disabilitas mendaftar ke sekolah formal seharusnya diberi karpet merah. Sebab bagi mereka sendiri itu seharusnya sudah menjadi nilai plus dengan berbagai macam kekurangannya.

“Anak disabilitas ini halangannya banyak. Mulai dari stigma, diskriminasi. Mereka berani mendaftar aja udah luar biasa. Jangan sampai mereka yang berani mendaftar berani keluar rumah. Berani sosialisasi. Sampe sekolah malah ditolak. Ini sangat mendzolimi anak-anak disabilitas,” tegasnya.

Disamping itu, Ubaid juga menuturkan anak-anak disabilitas tidak kalah dengan mereka yang terbilang normal. “Beliau (Gus Dur) juga kan bagian dari itu. Jadi sebetulnya kalau anak-anak disabilitas diberi ruang, diberi kesempatan, mereka pasti mampu membuktikan. Disamping kekurangan yang mereka alami, ada kelebihan yang harus dihargai,” pungkasnya. (rp1)